



**PERSAINGAN ANTARA PPP DAN GOLKAR PADA
MASA ORDE BARU DI KOTA PEKALONGAN TAHUN
1977-1997**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh :
Swesty Oriestya Pratiwi
NIM. 3111412021

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Uji

Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Unnes pada :

Hari : *Kamis*

Tanggal : *18 Juli 2019*

Pembimbing I



Prof. Dr. Wasino M.Hum.

NIP. 196408051989011001

Pembimbing II



Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd.

NIP. 196406051989011001

Mengetahui

Ketua Jurusan Sejarah UNNES



Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd.

NIP. 196406051989011001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 30 Juli 2019

Penguji I



Drs. Ibnu Sodik, M.Hum
NIP. 196312151989011001

Penguji II



Prof. Dr. Wasino, M.Hum
NIP. 196408051989011001

Penguji III



Dr. Hamdan Tri Atmaja, M.pd
NIP. 196406051989011001

Mengetahui

Dekan,



UNNES
ULTAS ILMU

Dr. Moh. Solihatul Mustofa, M.A.
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya tulis sendiri, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Juli 2019



Swesty Oriesty Pratiwi

NIM. 3111412021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu”

-Ibnu Qayyim Al Jauziyyah-

Kupersembahkan karya kecilku untuk:

- Kedua orang tua tercinta, **Bapak Rusdiyanto dan Ibu Istiqomah** yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tak pernah henti
- Adikku **Taritsa Ariestyningrum** yang terus menyemangatiku
- **Teman-teman** seperjuangan ku yang selalu mendukung untuk meraih gelarnya
- **Almamater Universitas Negeri Semarang**

PRAKATA

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini hingga selesai walaupun disepanjang penyusunannya baik sebelum, awal, maupun pada tahap akhirnya banyak menghadapi hambatan dan tantangan.

Pada kesempatan ini sudah sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik berupa materi maupun jasa, dengan segenap keikhlasn penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang (UNNES)
2. Dr. Moh. Solehatul Mustofa, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (UNNES)
3. Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd. selaku Ketua Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang (UNNES)
4. Prof. Dr. Wasino M.Hum. dan Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd. Selaku Pembimbing I dan II yang dengan ikhlas dan sabar memberikan bimbingan dan arahan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Drs. Ibnu Sodiq, M.Hum. Selaku Dosen Penguji Utama

6. Semua dosen jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberi bekal pengetahuan yang berharga.
7. H. Machmud Masjkur, Riyanto DC, dan Basir selaku informan yang telah memberikan informasi dan bantuannya
8. Staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Peakalongan, Staf Badan Statistik Kota Pekalongan, dan Staf Kantor KPU Kota Pekalongan atas segala informasi dan bantuannya
9. Pihak perpustakaan Universitas Negeri Semarang, perpustakaan Jurusan Sejarah, terutama staf-stafnya yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.
10. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penulisan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan alam kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sangat berharap semoga hasil yang terdapat dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang ada kaitannya dengan masalah ini.

Semarang, Juli 2019

Penulis

SARI

Pratiwi, Swesty Oriestya. 2019. *Persaingan antara PPP dan Golkar pada Pemilu Masa Orde Baru di Kota Pekalongan Tahun 1977-1997*. Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial . Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Wasino M.Hum, Pembimbing II Dr. Hamdan Tri Atmaja M.Pd.

Kata Kunci : Kota Pekalongan, Orde Baru, Persaingan

Kota Pekalongan pada Masa Orde Baru terjadi persaingan antar partai PPP dan Golkar, konflik antar partai ini melibatkan masyarakat etnis Tionghoa (Cina) sebagai korban dalam persaingan kedua partai.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui tumbuh dan berkembangnya PPP dan Golkar di Kota Pekalongan, (2) faktor apa saja yang memicu terjadinya persaingan antar PPP dan Golkar, (3) akibat yang terjadi dengan adanya persaingan antar PPP dan Golkar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yaitu : heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan persaingan di Kota Pekalongan antara PPP dan Golkar menjadikan konflik besar pada masa Orde Baru, terjadinya konflik dilatarbelakangi oleh faktor politik, ekonomi dan sosial. Hal tersebut yang menjadikan kerusuhan pada setiap Pemilihan Umum di Kota Pekalongan, namun konflik yang memuncak terjadi pada tahun 1997 dengan adanya pembakaran panggung milik Golkar yang akan menyelenggarakan pengajian yang kemudian dibakar oleh PPP karena diduga sebagai sarana kampanye Golkar.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Golkar merupakan partai politik yang memiliki dominasi di tingkat pusat maupun daerah, sedangkan PPP memiliki pemilih fanatik di Kota Pekalongan, hal ini yang menjadikan Golkar ingin merebut suara di Pekalongan dan menjadi persaingan antar kedua partai politik di setiap pemilihan umum. Akibatnya terjadi kerusuhan antara para simpatisan kedua partai politik tersebut dan menghilangkan tingkat keharmonisan antar masyarakat.

ABSTRACT

There had been a rivalry between PPP and Golkar parties Pekalongan City during the Era Orde Baru, the conflict between the two parties involved Tionghoa ethnicity (Chinese) as victims of their rivalry.

The purposes of this research were (1) to find out the rising and development of PPP and Golkar in Pekalongan City, (2) which factors that triggered the rivalry between PPP and Golkar, (3) the impacts of the rivalry between PPP and Golkar.

This research used historical research methods namely: heuristic, source criticism, interpretation, and historiography. The data collection used interview, document study, and library research.

The result of the research showed the rivalry in Pekalongan City between PPP and Golkar became a huge conflict during Era Orde Baru, the conflict's backgrounds were political, economical, and social issues. It led into chaos during every election, but the conflict peaked in 1997 by the burning of Golkar's stage, which was set for Quran reading, by the PPP because it was assumed as a Golkar's campaign platform.

This research concluded that Golkar was dominating at the central and regional levels, while PPP had fanatical voters in Pekalongan City, thus it drove Golkar to seize the votes in Pekalongan and prompted political rivalry between the two parties in every election. As a result there was chaos between the supporters of the two political parties and it diminished the level of harmony within the society.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR PETA	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kajian Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II BERDIRINYA PPP DAN GOLKAR SEBAGAI KONTESTAN

PEMILU	21
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan	21
B. Perkembangan Islam di Kota Pekalongan	24
C. Berdirinya Golkar sebagai Kontestan Pemilu	25
D. Berdirinya PPP di Kota Pekalongan.....	29

BAB III PERSAINGAN PPP DAN GOLKAR 32

A. Kota Pekalongan sebagai Basis Islam	32
B. Kerusuhan di Kota Pekalongan Masa Orde Baru	34
C. Faktor Persaingan PPP dan Golkar	52
D. Perilaku Pemilih di Kota Pekalongan.....	56

BAB IV DINAMIKA PEROLEHAN SUARA DI KOTA

PEKALONGAN TAHUN 1977-1997 60

A. Dinamika Perolehan Suara	61
B. Dinamika Masyarakat dan Jumlah Wakil DPRD Kota Pekalongan.	72
C. Dampak setelah terjadinya Kerusuhan 1997	79

BAB V PENUTUP..... 81

A. Simpulan.....	81
------------------	----

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN 87

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kelurahan yang diungguli PPP	62
Tabel 2. Jumlah Kelurahan yang diungguli Golkar	62
Tabel 3. Hasil Perolehan Suara dari tahun 1977-1997	70

DAFTAR PETA

Peta 1. Peta Kota Pekalongan Hasil Pemilu 1977	63
Peta 2. Peta Kota Pekalongan Hasil Pemilu 1982	64
Peta 3. Peta Kota Pekalongan Hasil Pemilu 1987	65
Peta 4. Peta Kota Pekalongan Hasil Pemilu 1992	66
Peta 5. Peta Kota Pekalongan Hasil Pemilu 1997	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Peta Kota Pekalongan
- Lampiran 2 : Geografis Kota Pekalongan
- Lampiran 3 : Arsip Koran Pemekaran Kota Pekalongan (Suara Merdeka, 12 Mei 1997)
- Lampiran 4 : Arsip Koran Daftar Tetap Calon DPRD II (Suara Merdeka, 10 Maret 1977)
- Lampiran 5 : Pembagian Administratif Kota Pekalongan 1987
- Lampiran 6 : Hasil Pemungutan Suara tahun 1977
- Lampiran 7 : Hasil Penghitungan Suara tahun 1982
- Lampiran 8 : Hasil Pemilu Arsip KPU tahun 1982
- Lampiran 9 : Lanjutan Hasil Pemilu 1982
- Lampiran 10 : Hasil Penghitungan Suara tahun 1987
- Lampiran 11 : Hasil Pemilu tahun 1987
- Lampiran 12 : Lanjutan Hasil Pemilu 1987
- Lampiran 13 : Hasil Pemilu tahun 1992
- Lampiran 14 : Lanjutan Hasil Pemilu 1992
- Lampiran 15 : Hasil Pemilu tahun 1997
- Lampiran 16 : Lanjutan Hasil Pemilu 1997
- Lampiran 17 : Informasi Isu-isu di Kota Pekalongan
- Lampiran 18 : Surat Pengarahan Kampanye Golkar
- Lampiran 19 : Nama-nama Anggota DPRD Kota Pekalongan 1977-1982
- Lampiran 20 : Nama-nama Anggota DPRD Kota Pekalongan 1987-1992
- Lampiran 21 : Nama-nama Anggota DPRD Kota Pekalongan 1997
- Lampiran 22 : Foto Lokasi Kerusakan Pondok Al-Quran
- Lampiran 23 : Foto Narasumber Machmud Masjkur, dan Basir Ketua KPU Kota Pekalongan
- Lampiran 24 : Foto Narasumber Riyanto, dan Staf Arpus Kota Pekalongan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelahiran Republik Indonesia diawali dengan pernyataan kemerdekaan Indonesia ke penjuru dunia pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta, yang merupakan awal dimulainya sistem politik di Indonesia. Tidak akan ada habisnya jika membahas tentang dunia politik, terutama politik di Negeri Indonesia ini, masih banyak misteri yang belum terungkap dalam dunia politik negeri Indonesia. Pada dasarnya sejarah adalah politik pada masa lampau dan politik adalah sejarah pada masa kini (Suwarno, 2012: 8). Bagi orang awam, politik adalah sebuah wadah yang berisi orang-orang besar dengan segala bentuk kekuasaannya di negeri ini. Baik itu sistem politik secara keseluruhan, termasuk juga sistem kepartaian. Lembaga demokrasi atau tempat dimana rakyat dapat melakukan partisipasinya bisa disebut Partai Politik, namun partai politik juga bisa diartikan sebagai sebuah kelompok yang memiliki tujuan untuk mencari, melaksanakan, mendapatkan dan mempertahankan sebuah kekuasaan politik. Carl J. Friedrich berpendapat mengenai partai politik yaitu :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan materiil (A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages) (Miriam Budiarjo, 20008).

Partai politik mempunyai suatu dimensi yang penting dalam sebuah sistem politik demokratis yang memiliki fungsi untuk merealisasikan kepentingan masyarakat, sehingga partai politik dituntut untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi atau penyaluran realisasi masukan dari rakyat. Partai politik memiliki keterkaitan dengan sistem pemilihan umum (pemilu) karena pada dasarnya hanya partai politik yang menang dalam pemilu saja yang dapat memiliki sebuah wewenang atau kekuasaan dalam pemerintahan.

Pemilihan umum sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintah oleh sejumlah elite politik (Toni Andrianus, dkk, 2006: 298). Pemilihan umum erat kaitannya dengan demokrasi karena dalam sebuah pemilihan umum terkandung sebuah persaingan antar partai atau calon yang akan mewakili rakyat dari sebuah partai politik tertentu, serta kebebasan dalam menggunakan hak suara bagi rakyat dengan cara mencoblos lambang partai atau calon wakil rakyat yang akan dipilih, serta kebebasan bagi partai politik dengan memanfaatkan pers yang ada.

Pemilihan umum pertama yang berlangsung di Indonesia dimulai pada tahun 1955 berlangsung pada era Demokrasi Parlementer dengan landasan dalam Pemilu 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 untuk memilih anggota-anggota parlemen (DPR) dan Konstituante (merupakan lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi UUD negara) (Suwarno, 2012: 97). Disinilah bisa dikatakan bahwa pemilu pertama tahun 1955 merupakan pengalaman baru bagi penyelenggara sebuah demokrasi di

Indonesia, secara nasional hasil pemilu tahun 1955 didominasi oleh empat partai, yaitu: PNI, Masyumi, NU, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Di Indonesia mengenal dua orde periodisasi, yaitu Orde Lama dan Orde Baru dengan Orde Lama di kenal dengan masa Soekarno sedangkan Orde Baru terkenal dengan masa Soeharto. Orde Baru adalah suatu tatanan pemerintahan Republik Indonesia yang berkuasa sejak tahun 1966 hingga Mei 1998 dengan tonggak awal kelahiran Orde Baru adalah saat diteruskannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto (Mukhammad Shokheh, 2008 : 19).

Pada masa Orde Baru saat pemerintahan Soeharto di laksanakan pemilu yang sebelumnya telah terlaksana pada tahun 1955, kali ini pemilu Orde Baru dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dimulai pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 yang dilaksanakan di daerah-daerah dan salah satunya di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah pesisir yang terkenal dengan nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, sehingga Partai NU menjadi salah satu fusi pendukung terbentuknya PPP. Kecenderungan tradisi politik kiai dan masyarakat kota Pekalongan adalah mendukung partai Islam, maka secara umum mayoritas warga kota itu memberikan dukungan kepada PPP sebagai pewaris tradisi partai Islam (Syamsuddin Haris, 1999: 45).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan pada tanggal 5 Januari 1973, sebagai fusi dari empat partai Islam peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 1971.

Keempat partai Islam tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Partai Perti).

Kota Pekalongan dengan mayoritas pendukung PPP merupakan saingan terbesar bagi partai lain pada masa Orde Baru, seperti Golkar yang ingin mendapatkan dukungan suara pada pemilu-pemilu yang berlangsung dari masyarakat Pekalongan dengan cara mengajak para golongan sipil dan pemerintahan untuk menjadi para simpatisan Golkar. Partai Golkar terbentuk bermula dari berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada akhir pemerintahan Presiden Soekarno, pada tanggal 20 Oktober 1964 atas keinginan ABRI untuk membendung PKI dalam Front Nasional. Awalnya, Sekber Golkar terdiri dari 61 organisasi fungsional yang tidak berafiliasi ke partai-partai politik. Pada tahun 1969, melalui SK DPP Sekber No. 107/1969, Golkar dikelompokkan menjadi tujuh Kelompok Induk Organisasi (KINO) yang terdiri dari Kelompok Profesi, Ormas-ormas, dan Gerakan Pembangunan. Menjelang Pemilu 1971, dengan didukung tujuh KINO tersebut, Golkar muncul dengan tanda gambar Pohon Beringin (Widjanarko Puspoyo, 2012 : 107) .

Perjalanan politik di Kota Pekalongan selama masa orde baru telah terjadi enam kali pemilu yang dimulai pada tahun 1971 dengan NU sebagai pilihan utama masyarakat Pekalongan karena dengan ciri khas ke-Islamannya atau kemenangan NU telah menempatkan Pekalongan sebagai salah satu basis andalan NU dengan kekuatan Islam santri. Pada tahun 1971 PPP belum mengikuti pemilu karena pada tahun tersebut belum terbentuknya PPP sebagai partai politik.

Persaingan antara PPP dan Golkar dimulai pada tahun 1977 sampai pemilu keenam yaitu tahun 1997 dengan segala konflik yang terjadi untuk mendapatkan suara yang lebih banyak dari masyarakat Pekalongan. Salah satunya dengan pengrusakan dan pembakaran panggung pengajian yang akan diselenggarakan oleh Golkar, toko-toko, kantor pemerintahan hingga rumah warga, peristiwa tersebut tidak terlepas dari persaingan keras antara PPP dan Golkar di Kota Pekalongan. Segala cara yang Golkar lakukan untuk merebut simpati warga Pekalongan tetaplah gagal, karena PPP tetap tangguh dan tak tergoyahkan posisinya di Kota Pekalongan.

Konflik yang terjadi tidak hanya dari luar partai saja, konflik unsur pun terjadi dari PPP yaitu dengan keluarnya NU dari PPP setelah pemilu tahun 1982 usai, yang kemudian NU mulai menjaga jarak dengan PPP dan bersikap netral. Partai NU yang keluar dari tubuh PPP sangat berpengaruh besar terhadap kekalahan PPP di Pekalongan, karena Pekalongan dikenal sebagai basis PPP di Jawa Tengah dan NU merupakan kekuatan terbesar pendukung PPP di Pekalongan selain Parmusi (Partai Muslimin Indonesia).

Sejarah politik sudah banyak ditulis oleh para sejarawan Indonesia karena memang sejarah adalah politik pada masa lampau dan politik adalah sejarah pada masa kini, namun peneliti ingin mengangkat sejarah politik yang berbeda dalam skripsi yang berjudul “ **Persaingan antara PPP dan Golkar pada Pemilu masa Orde Baru tahun 1977-1997 di Kota Pekalongan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tumbuh dan berkembangnya PPP dan Golkar sebagai kontestan Pemilu Masa Orde Baru di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana dan faktor apa saja yang memicu terjadinya persaingan PPP dan Golkar?
3. Apa akibat dari persaingan antara PPP dan Golkar di Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tumbuh dan berkembangnya PPP dan Golkar sebagai kontestan Pemilu Masa Orde Baru di Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang memicu terjadinya persaingan antara PPP dan Golkar di Kota Pekalongan.
3. Untuk mengetahui akibat yang terjadi dengan adanya persaingan antara PPP dan Golkar.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang sejarah politik yang terjadi di Kota Pekalongan dan selain itu

diharapkan hasil dari penulisan penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dalam pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi almamater, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran terutama dalam bidang sejarah politik, khususnya perkembangan politik yang terjadi di Kota Pekalongan.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi kepastakaan yang mengandung informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan memberikan gambaran awal yang mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan sejenis atau bagi pembaca yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi pada pokok permasalahan saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari permasalahan, sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini dapat dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

Penelitian sejarah memiliki karakter yang berbeda dengan penulisan karya ilmiah dan tema kajian ilmu sosial yang lain. Penulisan sejarah akan menjadi lebih

mudah dan terarah jika dilengkapi dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial. Sejarahawan dapat terhindar dari hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis.

Ruang lingkup sejarah lokal menurut I Gede Widja adalah suatu bentuk tulisan dalam lingkup terbatas lokalitas tertentu. Batasan spasial dan batasan temporal dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Batasan Spasial

Ruang lingkup spasial adalah batasan mengenai tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah atau “pembatasan” dari sudut geografis dan administratif. Dari sudut geografis kita berhadapan dengan soal-soal ekologis, sedang secara administratif kita akan menghadapi selalu berubahnya pembatasan itu sebagai akibat peralihan pertimbangan politik (Taufik Abdullah, 1985 : 321).

Ruang lingkup spasial yang diambil adalah Kota Pekalongan. Pekalongan merupakan daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan bersuku Jawa. Karakter pemilih di Kota Pekalongan memang tergolong unik karena agama sebagai acuan dalam menentukan pilihan suatu partai politik. Selama Masa Orde Baru partai Islam seperti PPP tidak mendominasi pada pemilu 1987 melainkan Golkar yang mendapatkan suara lebih banyak dari PPP di Kota Pekalongan.

2. Batasan Temporal

Ruang lingkup temporal adalah batasan waktu terjadinya peristiwa sejarah yang menjadi objek penelitian, peneliti batasi pada masa orde baru dari tahun 1977 sampai 1997. Pemilihan waktu tersebut karena telah

diselenggarakan enam kali pemilu. Tahun 1977 merupakan pemilu pertama bagi PPP sejak dibentuknya partai tersebut pada tahun 1973 dan tahun 1997 merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru Pemerintahan Soeharto-Habibie, dimana Kota Pekalongan masih tetap menempatkan PPP sebagai pemenang.

Ruang lingkup temporal 1977 sampai 1997 diambil karena pada masa itu merupakan beralihnya masa orde lama ke orde baru dan terjadi pemilu pertama bagi PPP. Pada pemilu 1971 pemilu pertama pada masa Orde Baru yang dilakukan ketika pemerintahan Soeharto yang telah empat tahun berada dikursi kepresidenan, dan yang membedakan pemilu 1971 dengan 1955 adalah para pejabat negara diharuskan bersikap netral, namun pada praktiknya pemilu 1971 para pejabat pemerintahan justru tidak bersikap netral melainkan berpihak kepada salah satu peserta pemilu yaitu Golkar. Peserta pemilu tahun 1971 antara lain Golkar, NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, IPKI, dan Partai Murba.

Pada pemilu 1977 telah terjadi penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh Presiden Soeharto ke dalam tiga golongan, yaitu : Golongan Nasionalis, Golongan Spiritual, dan Golongan Karya. Pasca pemilu 1971 ada keharusan mengenai penyederhanaan partai politik sebagai salah satu Ketetapan MPR yang pada tahun 1973 secara resmi Golongan Nasionalis berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai fusi dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik. Partai Politik Islam terbentuknya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil fusi dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti

(Suwarno, 2012 : 104). Pada pemilu 1977 hanya ada tiga peserta kontestan dalam pesta demokrasi, menariknya adalah untuk pertama kalinya PPP menjadi partai politik dan mendapatkan suara massa terbanyak di Kota Pekalongan karena dengan latar belakang ke-Islamannya.

Pemilu 1982 merupakan dimana masa pemantapan bagi Golkar untuk terus mendominasi panggung politik nasional, rekayasa politik untuk memenangkan Golkar ditandai dengan politik massa mengambang yang diterapkan, dimana Golkar boleh memiliki jaringan hingga ke desa-desa sementara PPP dan PDI hanya boleh membuka jaringan sampai di kecamatan, namun tetap saja di Kota Pekalongan PPP masih menjadi pilihan utama dengan mendapatkan suara massa yang terbanyak dengan mengalahkan Golkar dan PDI. Pada pemilu 1987 merupakan pemilu pertama yang dihadapi oleh PPP setelah keluarnya UU No. 3 dan 8 tahun 1985 tentang organisasi politik (orpol) dan organisasi kemasyarakatan (ormas) mewajibkan semua orpol dan ormas agar menganut asas tunggal Pancasila, sebagai ideologi monolitik bangsa Indonesia, dan selain itu juga terjadi aksi penggembosan oleh kalangan NU. Aksi penggembosan NU ini berpengaruh bagi kekalahan PPP di Kota Pekalongan padahal sebagaimana telah diketahui di Pekalongan PPP tak terkalahkan sejak pemilu 1977 dan 1982.

Pada pemilu 1992 suara massa PPP di Kota Pekalongan menunjukkan kenaikan, sedangkan di luar Jawa terjadi penurunan suara PPP di daerah-daerah dengan basis Islam yang kuat. Menurunnya suara PPP di luar Jawa berkaitan dengan memudarnya PPP sebagai partai Islam, namun kehilangan

jatidiri Islam ini tidak menyurutkan pemilih Islam NU di Pekalongan kembali pada PPP. Pemilu keenam yang merupakan pemilu terakhir masa orde baru pada tahun 1997 terjadi kerusuhan di KotaPekalongan antara pendukung PPP dan Golkar. Persaingan PPP dan Golkar di Pekalongan sangat keras sekali dalam berebut pemilih, namun pada pemilu ini PPP bisa mempertahankan basis massanya di Kota Pekalongan bahkan dapat menaikkan jumlah suara massanya.

F. Tinjauan Pustaka

Persaingan antara PPP dan Golkar dalam Pemilu pada masa Orde Baru tahun 1977-1997 di Kota Pekalongan perlu mengacu pada teori dan sumber-sumber yang berkaitan. Pembahasan skripsi ini menggunakan Teori Konflik oleh George Simmel yang menegaskan bahwa konflik merupakan suatu variabel yang menampilkan derajat intensitas interaksi. Proposisi tentang intensitas konflik yaitu bahwa semakin tinggi derajat keterlibatan emosional pihak yang terlibat dalam suatu konflik, maka semakin kuat kecenderungan untuk mengarah pada kekerasan. Penggunaan teori konflik pada skripsi ini karena pembahasan yang diangkat adalah suatu persaingan antara partai politik yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu konflik yang di ikuti pada kekerasan dalam persaingan antar partai tersebut (Achmad Habib, 2004 : 28).

Pembahasan Persaingan antara PPP dan Golkar dalam Pemilu pada masa Orde Baru tahun 1977-1997 di Kota Pekalongan dapat dijelaskan bahwa Persaingan Politik menjadi suatu konsep yang sangat penting di Pemerintahan Indonesia, karena satu partai harus bersaing dengan partai lain untuk dapat keluar

sebagai pemenang dalam pemilu. Schattschneider (1942) melihat bahwa demokrasi merupakan sistem yang berbasis persaingan antar partai politik dan pemilihlah yang menentukan sebagai pihak yang berada diluar sistem dan organisasi partai, sehingga persaingan dapat diartikan sebagai sebuah interaksi tanpa kontak sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merebutkannya untuk keluar sebagai pemenang.

Sumber-sumber yang digunakan adalah sumber sekunder berupa literatur atau buku yang memiliki korelasi dengan pembahasan skripsi ini. Sumber berupa literatur dan buku tersebut perlu diuraikan di sini untuk lebih memahaminya. Uraannya berupa pembahasan tentang isi buku, hubungan dengan permasalahan, kelebihan serta kekurangan buku.

Buku pertama berjudul “ **Dari Soekarno Hingga Yudhoyono : Pemilu Indonesia 1955-2009** “. Buku ini ditulis oleh Widjanarko Puspoyo dan diterbitkan tahun 2012 oleh penerbit Era Adicitra Intermedia. Isinya menyajikan sejarah Pemilu sejak tahun 1955 dengan sistem perwakilan, sampai era Orde Baru yang tersentralisasi, era Reformasi dan pemilihan langsung, dengan upaya untuk menggambarkan sejarah perjuangan bangsa untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Penulis buku ini juga ingin memberikan gambaran bahwa masa depan kehidupan dan sistem politik akan menjadi lebih baik.

Relevansi buku ini yaitu membantu penulis untuk memahami tentang perjalanan pemilihan umum di Republik Indonesia sejak tahun 1955-2009, semasa Orde Lama yang penuh dengan pertempuran ideologi yang kemudian ke era Orde Baru yang menggeser Orde Lama dengan melakukan kebijakan penggabungan

partai dalam sebuah payung ideologi yang longgar. Membantu penulis dengan pembahasannya yang menyeluruh tentang diadakannya pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia terutama pada masa Orde Baru.

Kelebihan buku ini adalah pembahasannya sangat mendetail tentang sistem pemilihan umum dari masa Orde Lama sampai masa Reformasi yang berlangsung di Indonesia. Isi buku cukup bagus sebagai bahan acuan mengenai sistem politik di Indonesia. Bahasa yang sedikit sulit untuk dipahami merupakan kekurangan dari buku tersebut.

Buku kedua berjudul “ **Menggugat Politik Orde Baru** “. Buku ini ditulis oleh Syamsuddin Haris dan diterbitkan pada tahun 1998 oleh penerbit Pustaka Utama Grafiti. Isinya menerangkan tentang gugatan secara kritis terhadap kecenderungan penataan politik Orde Baru mulai dari Kasus PDI, PPP, dan Politik Golkar serta Birokrasi ABRI.

Adapun relevansi buku ini sedikit banyak memberi referensi kepada penulis tentang partai-partai yang ikut andil pada masa Orde Baru, terutama PPP dan Golkar. Ulasannya yang lebih bersifat kajian politik membantu untuk memahami tentang konflik di PPP, tentang politik Golkar dan cerita semasa Pemilu-pemilu Orde Baru.

Kelebihan buku tersebut adalah dalam bentuk penyajiannya, uraian yang diberikan jelas dan urut, sehingga enak dibaca serta dengan kata-kata yang mudah dipahami. Kajian tentang pemilu-pemilu masa Orde Baru tidak dibahas secara lengkap lebih menyoroiti pemilu tahun 1997, itu merupakan kekurangan dari buku tersebut.

Buku ketiga berjudul “ **Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997**“. Buku yang ditulis oleh Syamsuddin Haris dan dicetak pada tahun 1999, ini membahas tentang perlawanan lokal mengenai Pemilu tahun 1997 di berbagai daerah dan salah satunya adalah di Pekalongan. Di dalam buku ini pada Bab II membahas mengenai perlawanan masyarakat Pekalongan dalam Pemilu 1997.

Relevansi buku ini yaitu membantu penulis untuk memahami sejumlah kerusuhan menjelang Pemilu 1997. Pemaparan yang mendalam tentang sebab-sebab sejumlah kerusuhan di Kota Pekalongan ini bisa digunakan sebagai rujukan dalam menulis skripsi terutama mengenai PPP dan kaitannya dengan kerusuhan menjelang Pemilu 1997.

Kelebihan buku ini adalah uraiannya singkat dan mendetail tentang sejumlah hal yang berkaitan dengan kerusuhan di Kota Pekalongan. Pada pembahasan mengenai Pekalongan di Bab II sangat runtut dan jelas dan bagus sebagai bahan acuan mengenai sejumlah kerusuhan di Kota Pekalongan, selain itu dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga pembaca dapat menangkap apa yang dibahas dalam buku tersebut. Adapun kekurangan dari buku tersebut adalah ada penyebutan peristiwa yang berulang-ulang.

Buku keempat berjudul ” **PPP dan Politik Orde Baru**“. Buku ini ditulis oleh Syamsuddin Haris dan diterbitkan tahun 1991 oleh penerbit Grasindo. Isinya menerangkan tentang perkembangan PPP pada masa Orde Baru dari tahun 1973 sampai Pemilu 1987 dengan sedikit ulasan tentang partai tersebut pasca Pemilu

1987. Dalam buku ini diterangkan pula tentang konflik antar unsur, terutama antara NU dan MI menjelang Pemilu 1982 dan 1987.

Adapun relevansi buku ini sedikit banyak memberi referensi kepada penulis tentang PPP dari awal perkembangannya sampai tahun 1987. Ulasannya yang bersifat kajian politik membantu untuk memahami tentang konflik di PPP, serta sampai sejauh mana peranan pemerintah dalam masalah internal partai. Selain itu memberi gambaran yang memadai tentang gaya politik Orde Baru. Adapun semua peristiwa yang terjadi pada PPP pada tingkatan pusat berpengaruh pula terhadap dinamika PPP di Kota Pekalongan yang menjadi kajian skripsi ini.

Kelebihan buku tersebut adalah dalam bentuk penyajiannya. Uraian yang diberikan singkat, padat, dan jelas sehingga enak dibaca. Bagi para peminat buku politik, buku ini termasuk kategori pengguna bahasa ringan yang tidak menjemukan.

Kajian yang hanya sebatas sampai tahun 1987 dan beberapa tahun sesudahnya merupakan kekurangan buku ini. Selain itu ulasan yang diberikan kurang mendalam.

G. Metode Penelitian

Penulisan sejarah memiliki metode seperti halnya pada ilmu alam dan ilmu sosial yang lain. Didalam melakukan pengumpulan sumber dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah yang mempunyai kaidah-kaidah tertentu. Penulisan peristiwa sejarah harus bersifat sistematis dan objektif maka perlu adanya empat langkah yang utama dalam kegiatan mengumpulkan data, yaitu usaha mencari dan mengumpulkan jejak atau sumber sejarah masa lampau, usaha

meneliti jejak sejarah masa lampau secara kritis, menginterpretasikan hubungan fakta satu dengan fakta yang lain yang menunjang fakta tersebut, menyampaikan hasil rekonstruksi masa lampau melalui penulisan sejarah (I Gde Widja, 1989). Metode sejarah kritis merupakan suatu proses menganalisis dan menguji rekaman atau peninggalan masa lampau. Ada empat tahapan yang harus dilakukan dalam penulisan sejarah. Tahapan-tahapan tersebut adalah :

1. Heuristik atau Pengumpulan Sumber

Tahap pertama berupa aktivitas pengumpulan sumber/data sejarah, baik sumber primer maupun sekunder. Pengumpulan sumber ini sangat penting guna memperoleh data yang dibutuhkan baik secara tertulis maupun lisan. Heuristik seringkali dikatakan sebagai teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. sumber sejarah dibagi menjadi tiga yaitu, artefak, sumber tertulis, dan sumber lisan.

Berdasarkan sifatnya ada dua macam sumber sejarah yaitu sumber primer dan sekunder (Gottschalk, 1995 : 35). Sumber primer adalah sumber yang waktu pembuatannya tidak jauh dari waktu terjadinya peristiwa, dalam hal ini sumber yang digunakan untuk penulisan skripsi ini diperoleh dari Arsip-arsip yang didapat dari berbagai tempat yaitu; Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekalongan, dan Kantor Arsip Kota Pekalongan dan arsip koran dari Depo Suara Merdeka. Sementara sumber sekunder adalah sumber yang waktu pembuatannya jauh dari waktu terjadinya peristiwa, dan yang dipakai dalam skripsi ini berupa buku-buku dan artikel-artikel dalam majalah yang diperoleh dari Perpustakaan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang, ,

Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Sumber lisan juga digunakan untuk melengkapi sumber sekunder yang ada berupa wawancara dengan tokoh-tokoh PPP, Golkar, serta masyarakat umum yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

2. Kritik Sumber

Kritik Sumber adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik. Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi dan manipulasi. Sumber harus diverifikasi atau diuji kebenarannya dan diuji ketepatannya. Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya (*credible*), penguatan saksi mata (*eyewitness*, benar (*truth*), tidak dipalsukan (*unfabricated*), handal (*reliable*). Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kritik Ekstern

Bertujuan untuk menguji intensitas asli tidaknya sumber yang digunakan, caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang bersangkutan saling diperbandingkan juga. Tidak semua jawaban ditulis karena tidak lulus seleksi. Hal ini wajar karena tiap pribadi mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kritik ekstern juga merupakan penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandang nilai kenyataan (kebenaran) semata-mata. Kritik ini merupakan

tahapan yang sangat penting sebab sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah disebut sebagai kritisme sejarah (Wasino, 2007:9).

Dalam kritik ekstern terdapat tiga pertanyaan yang dapat diajukan yaitu apakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki, adakah sumber itu asli atau turunan, adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah (Wasino,2007:51).

Penulis melakukan kritik ekstern dengan cara mewawancarai beberapa informan dan mengkaji sumber-sumber yang tepat, selanjutnya data yang dianggap benar dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, disusun sebagai fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang didapat dari pemerintah, tokoh agama, pelaku konflik kerusuhan dan dari sumber-sumber tertulis, kemudian diambil data yang lebih kredibel.

b. Kritik Interen

Kritik intern yaitu kritik yang menilai sumber-sumber yang berhasil dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku perpustakaan guna melihat isinya relevan dengan permasalahan yang dikaji dan bisa dipercaya kebenarannya. Membandingkan kesaksian berbagai sumber dengan menjejerkan dari saksi-saksi yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Apakah saksi tersebut mempunyai keberanian untuk menyatakan kebenaran dari suatu sumber ataupun peristiwa (Wasino, 2007:55).

3. Interpretasi Atau Sintesa Fakta

Tahap ketiga dari metode sejarah sebelum penulisan sejarah. Tahap ini bertujuan untuk membuat hubungan antara fakta yang sama dan sejenis. Tahap ini juga bertujuan untuk menafsirkan dan membandingkan fakta yang sudah terklarifikasi untuk diceritakan kembali. Proses ini peran imajinasi sangat besar, karena imajinasi membantu sejarawan dalam merekat fakta yang telah disintesakan dan kemudian diinterpretasikan dalam bentuk kata dan kalimat, sehingga dapat dimengerti. Pada metode sejarah kritis perlu juga diterapkan pendekatan dan teori, karena sangat membantu sejarawan dalam menerangkan hal-hal kecil yang sering terlupakan juga dalam melakukan analisa secara lebih mendalam.

4. Historiografi atau Penulisan

Tahapan keempat dari metode sejarah kritis yang bertujuan memaparkan fakta dalam bentuk tulisan yang sudah disintesakan dan dianalisis dengan menggunakan bahasa yang baik, sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Tahap ini juga dapat dikatakan sebagai penyajian data secara utuh. Untuk itu diperlukan suatu kemahiran tertentu, sehingga dapat tersusun suatu bentuk karya sejarah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan perlu dibuat untuk memberikan gambaran umum tentang apa yang dibahas. Berikut ini akan diuraikan sistematika penulisannya :

Bab I, merupakan bagian pendahuluan, terdiri atas latar belakang dari tema yang diangkat; rumusan masalah; ruang lingkup meliputi lingkup spasial, temporal, dan

keilmuan; tinjauan pustaka memuat buku dan literatur yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini; metode penelitian dan penggunaan sumber merupakan cara yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini; dan terakhir berupa sistematika atau bentuk penulisan yang akan disajikan.

Bab II, membahas tentang berdirinya PPP dan Golkar di Kota Pekalongan sebagai kontestan Pemilihan Umum. Pembahasannya meliputi Gambaran Umum Kota Pekalongan dan perkembangan Islam di Kota Pekalongan, berdirinya Golkar sebagai kontestan Pemilihan Umum, berdirinya PPP di Kota Pekalongan.

Bab III, membahas tentang persaingan PPP dan Golkar di Kota Pekalongan, berisi tentang kerusuhan yang terjadi selama masa Orde Baru dan faktor-faktor penyebab terjadinya kerusuhan antar kedua partai politik tersebut.

Bab IV, membahas tentang dinamika perolehan suara di Kota Pekalongan. Pembahasan meliputi perolehan suara pada tingkat kota, dinamika jumlah wakil DPRD di Kota Pekalongan, dan dampak terjadinya kerusuhan dari segi politik, sosial, dan ekonomi.

Bab V, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB II

BERDIRINYA PPP DAN GOLKAR SEBAGAI KONTESTAN PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu kota di pesisir pantai utara Provinsi Jawa Tengah yang memiliki pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Pelabuhan ini sering menjadi transit dari area pelelangan hasil tangkapan laut oleh para nelayan dari berbagai daerah, selain itu di Kota Pekalongan banyak terdapat perusahaan pengolahan hasil laut, seperti ikan asin, ikan asap, tepung ikan, terasi, dan kerupuk iakan, baik perusahaan berskala besar maupun industri rumah tangga.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya, karena mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Ada beberapa adat tradisi di Pekalongan yang tidak dijumpai di daerah lain semisal ; syawalan, sedekah bumi, dan sebagainya. Syawalan adalah perayaan tujuh hari setelah Idul Fitri dan disemarakkan dengan pemotongan lopis raksasa untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para pengunjung.

Nama Pekalongan sampai saat ini belum jelas asal-usulnya, belum ada prasasti atau dokumen lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan, yang ada hanya berupa cerita rakyat atau legenda. Sebutan Pekalongan dapat dijumpai dalam catatan perjalanan *Poerwa Lelan*, seorang pangeran Mataram yang melakukan perjalanan. Dalam tulisannya disebutkan bahwa “Pekalongan” merupakan turunan dari kata *along*, suatu kata yang sangat dekat dengan dunia kenelayanan, yang

artinya memperoleh hasil tangkapan ikan di laut. Sampai sekarang *along* merupakan sebutan umum yang digunakan untuk menamakan hasil penangkapan dalam jumlah besar atau banyak oleh masyarakat nelayan di kawasan pantai utara Jawa bagian tengah (Sutejo Kuwat Widodo dalam Wasino, 2017 :13).

Pada pertengahan abad XIX dikalangan kaum liberal, Belanda muncul dengan pemikiran etis yang selanjutnya dikenal sebagai Politik etis yang menyerukan Program Desentralisasi Kekuasaan Administratif yang memberikan hak otonomi kepada setiap Karesidenan (*Gewest*) dan Kota Besar (*Gumentee*) serta pembentukan dewan-dewan daerah di wilayah administratif tersebut. Pemikiran kaum liberal ini ditanggapi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dengan dikeluarkannya *Staatblad* Nomer 329 Tahun 1903 yang menjadi dasar hukum pemberian hak otonomi kepada setiap Residensi dan untuk Kota Pekalongan hak otonomi ini diatur dalam *Staatblaad* Nomer 124 Tahun 1906. Pada 21 Februari wilayah ini ditetapkan sebagai Pemerintah Kota yang memperoleh anggaran dari Pemerintah Belanda. Sejak 1 April Kota Pekalongan merupakan daerah yang mempunyai otonomi masalah keuangan. Kota Pekalongan merupakan pusat pemerintahan, terdapat kantor pemerintahan Kota Pekalongan, Kantor Residen Pekalongan, dan Kantor Bupati Pekalongan. Kantor Bupati Pekalongan pindah ke wilayah Kabupaten Pekalongan di Kajen secara berangsur-angsur mulai pada tahun 1984 (Sutejo K. Widodo, 2005 : 75-76). Bangunan eks kantor Bupati Pekalongan masih terlihat di pusat kota lama Pekalongan. Kantor Walikota Pekalongan berada di daerah kelurahan Podosugih. Adapun kantor residen yang tidak berfungsi lagi setelah penghapusan wilayah keresidenan Pekalongan.

Wilayah Kota Pekalongan terbagi atas dua kecamatan dan 22 kelurahan atau desa. Kedua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur yang dipisahkan oleh sebuah sungai. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 12 kelurahan atau desa, yaitu Pajang Wetan, Kandang Panjang, Dukuh, Kraton Lor, Kraton Kidul, Bendan, Kramatsari, Podosugih, Medono, Kebulen, Sapuro, dan Kregon. Sedangkan di Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 10 kelurahan atau desa, yaitu : Krapyak Lor, Krapyak Kidul, Klego, Poncol, Sugih Waras, Sampangan, Noyontaan, Kauman, Kaputran, dan Landungsari (Peta Kota Pekalongan 1986).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomer 21 tahun 1988, Kota Pekalongan dimekarkan menjadi empat kecamatan dengan mengambil beberapa wilayah dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang, seluruhnya 16 desa terdiri atas 6 desa dari Kecamatan Tirto serta 8 desa dan 2 kelurahan dari kecamatan Buaran, sedangkan dari Kabupaten Batang yang masuk wilayah Kota Pekalongan adalah 8 desa terdiri atas 5 desa dari Kecamatan Batang dan 3 desa dari Kecamatan Warungasem. Luas semua desa pemekaran seluruhnya mencapai sekitar 2.710.24 hektar (Suara Merdeka, 12 Mei 1997 : 5). Kecamatan Buaran dan Tirto terkenal dengan daerah santri karena adanya sejumlah pesantren baik besar maupun kecil yang berkembang di daerah itu, dengan pemekaran wilayah Kota Pekalongan secara administratif terbagi dalam 4 Kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 13 Kelurahan atau desa, yaitu : Pasirsari, Kramatsari, Kraton Kidul, Tirto, Bendan, Kergon, Tegalrejo, Podosugih, Sapuro, Bumirejo, Pringlangu, Medono dan Kebulen.

- b. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 9 Kelurahan atau desa, yaitu :
Bandengan, Pabean, Kandang Panjang, Kraton Lor, Dukuh, Panjang Wetan, Krapyak Lor, Krapyak Kidul, dan Degayu.
- c. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 13 Kelurahan atau desa, yaitu:
Sampang, Sugihwaras, Klego, Gamer, Kauman, Kaputran, Poncol, Dekoro, Noyontaan, Karangmalang, Baros, Sokorejo, dan Landung Sari.
- d. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 11 Kelurahan atau desa, yaitu :
Banyurip Alit, Banyurip Ageng, Buaran, Kradenan, Jenggot, Kuripan Lor, Yosorejo, Soko, Kertoharjo, Kuripan Kidul, dan Duwet (Peta Kota Pekalongan tahun 1992).

B. Perkembangan Islam di Kota Pekalongan

Perkembangan Islam di Kota Pekalongan adalah islam tradisional, seperti islam yang berkembang di pesisir utara Pulau Jawa. Islam pada awalnya masuk ke pekalongan dibawa oleh para pedagang dari Jazirah Arab yang yang melewati India, mereka singgah, kawin dan menetap di Pekalongan. Proses masuknya islam dibawa oleh kaum awam dan bukan oleh guru dakwah atau ahli agama, yang menjadikan islam berkembang cenderung bersifat lentur, adatif, dan akomodatif yang dapat bercampur dengan tradisi Hindu ataupun tradisi lokal yang hidup dikalangan masyarakat setempat, dengan kata lain proses islamisasi Jawa di Pekalongan melalui praktek keseharian secara alami.

NU sebagai wadah organisasi keagamaan islam tradisional terbesar di Indonesia telah ada di Kota Pekalongan sejak masa-masa awal kelahiran organisasi tersebut, bahkan tokoh-tokoh Pekalongan terlibat dalam proses

kelahiran NU. Pada Mukhtamar NU pertama tanggal 21 oktober 1926 diselenggarakan di Kota Surabaya, dan Mukhtamar NU di Pekalongan terjadi pada tahun 1930 atau pada Mukhtamar NU ke V. Seiring perjalanan waktu berbagai aliran dan organisasi keagamaan islam modern juga berkembang di Kota Pekalongan. Organisasi Serikat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah menjadi SI sudah ada di Pekalongan sejak tahun 1913 atau satu tahun setelah SDI berdiri di Solo oleh Haji Samanhudi.

Muhammadiyah yang merupakan kelompok modern mulai berkembang di Pekalongan sejak tahun 1923, gerakan yang disemangati oleh pembaharuan dan pemurnian islam di Pekalongan banyak bergerak di bidang pendidikan, panti asuhan, dan rumah sakit. Gerakan Muhammadiyah berkembang terutama di daerah Pekalongan yang merupakan salah satu pusat industri tekstil di Kota Pekalongan, sementara itu aliran Syi'ah mulai berkembang di Kota Pekalongan pada sekitar tahun 1989 setelah Ustadz Ahmad Baraghbah mendirikan pesantren Al-Hadi di kampung Arab Pekalongan. Perkembangan komunitas Syi'ah di Pekalongan kurang menggembirakan bahkan mendapat penolakan dan tekanan oleh gerakan massa yang ingin membubarkan secara paksa karena dituduh menyebarkan ajaran tak lazim dan bertentangan dengan ajaran Islam.

C. Berdirinya Golkar sebagai Kontestan Pemilihan Umum

Kelahiran Partai Golkar pada era politik multipartai tidak dapat dipisahkan dengan sejarah terbentuknya Sekber Golkar pada tanggal 20 Oktober 1964 dan sampai akhirnya diganti menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971 atau dua minggu setelah pemilu pertama pada awal kebangkitan Orde Baru pada tanggal 5 Juli

1971. Pada awal kemunculan Sekber Golkar dirancang sebagai sebuah organisasi yang dapat mengimbangi kekuatan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dengan nekad merampas tanah milik tuan tanah yang sebagian besar berlatar belakang penganut Islam taat dan pendukung PNI. Konflik yang semakin meluas menjadi pembakaran, penculikan, bahkan pembunuhan. Di tengah meluasnya konflik yang dipicu aksi PKI, Sekber Gokar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964, yang merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang bebas pengaruh politik, namun setelah kudeta 1965, Sekber Golkar secara berangsur-angsur berubah menjadi semacam partai politik.

Pada bulan Agustus 1964 Presiden Sukarno mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) No. 193/1964 yang intinya menginstruksikan agar organisasi-organisasi yang berada dalam Front Nasional segera berafiliasi dengan partai-partai politik yang ada atau bergabung menjadi satu organisasi. Berdasarkan Kepres tersebut, organisasi-organisasi fungsional yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik kemudian membentuk Sekber Golkar. Pada pembentukan awal tercatat sedikitnya 61 organisasi fungsional non-afiliasi, termasuk militer (ABRI) yang ikut bergabung dalam Sekber Golkar. Pada proses pembentukan Sekber Golkar, militer dianggap memainkan peranan yang sentral karena memiliki kepentingan guna memelihara kekuatan kelompok anti-komunis.

Pasca kudeta 1965 tepatnya setelah penyerahan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 terbentuk keputusan penting dengan mengreorganisasi di tubuh Sekber Golkar dengan menggantikan Ketua Umum Sekber Golkar yang pertama yaitu Brigadir Jenderal (Brigjend) Djuhartono yang

digantikan oleh Mayor Jenderal (Mayjend) Suprpto Sukowati. Reorganisasi Sekber Golkar mengalami kemajuan yang cukup pesat seperti bergabungnya 291 organisasi fungsional didalam tubuh Sekber Golkar. Pada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II pada tanggal 2-7 November 1967 diputuskan bahwa akan dilakukan penyusunan kembali organisasi berdasarkan kategori kekaryaan. Tepatnya pada 9 Oktober 1969 penyusunan organisasi tersebut dilakukan sehingga 201 organisasi fungsional menjadi 7 Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu :

- a. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)
- b. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)
- c. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
- d. Organisasi Karya Profesi
- e. Ormas Peratahanan Keamanan (HANKAM)
- f. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)
- g. Gerakan Pembangunan untuk menghadapi Pemilu 1971

Tiga bulan setelah Suharto memperoleh mandat Supersemar tepatnya pada Juni 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengadakan sidang untuk mengesahkan mandat dan membahas tanggal pelaksanaan pemilu demi memberikan legitimasi bagi pemerintah Suharto. MPRS memutuskan bahwa pemilu akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968, namun karena beberapa alasan diantaranya ialah masalah keuangan yang yang masih belum memadai untuk menyelenggarakan pemilu akibat sisa-sisa beban (hutang) masa lalu, maka pelaksanaan pemilu diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971

melalui keputusan sidang MPRS pada bulan Maret. Presiden Suharto telah memilih Sekber Golkar sebagai alat politiknya yang utama untuk terjun sebagai peserta pemilu. Pada pemilu 1971 usaha-usaha untuk menjadikan Sekber Golkar sebagai organisasi politik yang besar banyak melakukan cara-cara yang dianggap berlebihan, namun menghasilkan sukses yang sangat gemilang. Kemenangan Sekber Golkar sekaligus membuktikan kesuksesan pemerintahan Suharto di dalam meraih dukungan politik masyarakat, dan tidak lama setelah kemenangannya, Sekber Golkar diubah menjadi Golkar pada tanggal 17 Juli 1971.

Sejak diubah menjadi Golkar setelah Pemilu 1971, Golkar secara resmi menjadi mesin politik Orde Baru. Golkar yang hadir sebagai kekuatan politik yang memberikan kepastian politik yang dibutuhkan oleh masyarakat setelah kekisruhan yang ditimbulkan oleh partai-partai politik di masa Sukarno telah memberikan corak baru bagi perpolitikan di Tanah Air, terlebih lagi setelah kemenangan Golkar pada Pemilu pertama pemerintahan Suharto, yang kemudian Suharto melakukan pembaruan struktur politik dengan penyederhanaan kepartaian dengan kekuatan sosial politik.

Pada awal tahun 1973, penyederhanaan kepartaian tuntas dilakukan, partai-partai politik yang pernah terlibat dalam Pemilu 1971 dikelompokkan menjadi dua partai berdasarkan kecenderungan ideologisnya, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Pada tahun 1975, penyederhanaan tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang No. 3 tentang Partai Politik dan Golongan Karya. Pemilu 1971 yang telah berlangsung menjadikan Golkar sebagai partai politik yang memiliki dominasi mutlak dalam kebanyakan

lembaga legislatif, baik ditingkat pusat maupun di daerah termasuk di Kota Pekalongan, sehingga disetiap Pemilu pihak Golkar selalu melakukan strategi yang dikembangkan untuk kemenangan dengan cara memobilisasi dukungan masyarakat, terutama mobilisasi dukungan dari kalangan birokrasi dan militer, sehingga Golkar menjadi organisasi politik yang telah mencapai formatnya sebagai mesin politik kekuasaan yang mapan (Umar Ibnu Alkhatab, 2009 : 39).

D. Berdirinya PPP di Kota Pekalongan

Kemenangan Sekber Golkar pada Pemilu 1971 telah memantapkan langkah pemerintah untuk melakukan perubahan struktur politik dalam bentuk penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik ini sudah muncul pada masa-masa awal kekuasaan Suharto, sehingga Orde Baru beserta kekuatan politik pendukungnya mulai mensosialisasikan penyederhanaan partai politik dalam dua afiliasi, pertama kelompok material-spiritual merupakan golongan yang memandang materi sebagai kekuatan pendorong perjuangan dan semangat keagamaan sebagai pendukung saja, termasuk dalam kelompok ini adalah partai-partai yang tergabung dalam PDI, dan yang kedua adalah kelompok spiritual-material merupakan golongan yang lebih mengedepankan semangat keagamaan sebagai corak perjuangan. Kelompok ini terutama terdapat pada partai-partai yang tergabung dalam PPP. Gagasan fusi ini lahir sejak awal 1966, ketika kritik mulai dilancarkan oleh berbagai kelompok atas konflik dan instabilitas yang terjadi sebelumnya. Partai-partai politik telah mendapat cap hitam bahwa konflik yang terjadi merupakan dampak dari banyaknya partai politik yang ada.

Penyederhanaan partai politik ini dilanjutkan dengan disahkannya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomer 22 Tahun 1966 tentang Pengaturan kembali struktur politik. Pada tanggal 20 Februari 1970, di hadapan sembilan pimpinan partai politik dan sekber Golkar yang ikut dalam Pemilu 1971, Presiden Suharto mengungkapkan saran-sarannya mengenai penggabungan partai ; pertama golongan nasionalis, kedua golongan spiritual, dan ketiga Golongan Karya (Arif Yulianto, 2002: 282-283).

Penggabungan yang sama terjadi di DPRD Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil pemilu tersebut, kelompok Demokrasi Pembangunan memiliki 3 orang anggota dari Partai PNI, yaitu Setyadi, Soebeno, dan Soedarminto. Sedangkan kelompok Persatuan Pembangunan terdiri dari 8 anggota, yang berasal dari Partai NU ada 6 orang dan 2 dari Parmusi.

Machmud Masjur menambahkan bahwa “ memang benar terbentuknya PPP di Kota Pekalongan merupakan hasil fusi dari dua partai, yaitu Partai NU dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), dari NU ada 6 orang yaitu Murtadho Makmur, saya (Machmud Masjkur), Achmad Dimjati, Dzakwan Dimjati, Abdul Choliq, dan Hamzah Shodiq, sedangkan dari Parmusi hanya 2 orang saja, yaitu Mochamad Baragbah dan Abdul Aziz Salim”(wawancara pada 31 Januari 2017).

Penggabungan ini menjadi cikal bakal berdirinya PPP di Kota Pekalongan. Fusi yang dimulai dari tingkat pusat pada tanggal 5 Januari 1973 dan diprakarsai oleh tokoh-tokoh empat partai Islam di Jakarta ini menjadi tanda bagi terbentuknya PPP. Pada bulan Maret PPP mulai di deklarasikan di Kota Pekalongan dan hanya terdapat unsur Parmusi dan NU, yang memegang peranan penting dalam pembentukan PPP di Kota Pekalongan. Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah tidak mempunyai perwakilan di Kota Pekalongan, karena merupakan

partai lokal yang hanya berkembang di daerah Minangkabau dan Aceh saja. Unsur PPP yang lain, yaitu PSII (Partai syarikat Islam Indonesia) memiliki perwakilan di Kota Pekalongan, namun tidak mempunyai pendukung yang signifikan.

Nahdatul Ulama dan Parmusi merupakan dua kekuatan utama yang menyokong keberadaan PPP di Kota Pekalongan, secara angka jumlah terbesar pendukung PPP adalah orang NU. Partai NU secara bulat memberikan dukungan pada PPP, berlainan dengan sikap Muhammadiyah yang mencabut dukungan pada Parmusi.

Terjadinya kudeta terhadap kepemimpinan tokoh senior Muhammadiyah dalam kepemimpinan Pusat Parmusi, organisasi tersebut memandang Parmusi tidak dapat menampung aspirasi politiknya, tetapi tidak melarang anggotanya aktif dalam partai tersebut. Sikap ini berdampak pada tersebarnya suara anggota Muhammadiyah ke Partai lain terutama Golkar.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, berdirinya Partai Golkar berawal pada era politik multipartai yang kemudian berubah menjadi Golkar pada tahun 1971 setelah pemilu pertama berlangsung sebagai awal kebangkitan Orde Baru, dan Golkar dapat dikatakan sebagai partai politik yang memiliki dominasi mutlak dalam kebanyakan lembaga legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk di Kota Pekalongan. Sedangkan PPP berdiri tahun 1973 setelah penyederhanaan partai politik dan PPP masuk dalam kelompok spiritual-material yang merupakan golongan yang lebih mengedepankan semangat keagamaan sebagai corak perjuangan. NU dan Parmusi merupakan dua kekuatan utama yang menyokong keberadaan PPP di Kota Pekalongan, secara angka, jumlah terbanyak pendukung PPP adalah orang-orang NU. Masyarakat Kota Pekalongan merupakan pemilih fanatik dari PPP, sehingga datangnya Golkar yang ingin merebut suara di Kota Pekalongan menjadikan konflik antar kedua partai ini tak ada hentinya. Hampir disetiap pemilu pada era Orde Baru di Kota Pekalongan selalu terjadi konflik antar para simpatisan partai.

Kedua, faktor persaingan kedua Partai di Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh faktor Ideologis yaitu dianggap sebagai ketaatan dalam politik sama halnya dengan ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, sehingga kiai dan tokoh-

tokoh agama dijadikan sebagai peran yang dinilai relatif dan efektif untuk merebut suara masyarakat Kota Pekalongan terutama para santri. Psikologis merupakan keterkaitan emosional pemilih terhadap partai, yang bergantung pada sosialisasi politik di lingkungan pemilih. Rasionalitas ialah pemilih secara rasional membuat pilihan tanpa melihat agama, kelas, dan latar belakang sebuah partai tetapi pemilih merasa mendapatkan manfaat atas partai tersebut.

Ketiga, akibat persaingan yang terjadi pada setiap Pemilu di Kota Pekalongan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar, seperti dampak sosial, ekonomi dan dampak politik. Pertama dampak sosial akibat terjadinya kerusuhan yang memuncak pada era Orde Baru yaitu 1997 yaitu, timbulnya ketakutan dan rasa was-was jika kerusuhan tersebut terulang kembali, terlebih lagi bagi etnis Tioghoa yang di jadikan sasaran kemarahan dan amuk massa hingga toko mereka dijarah. Selain itu bagi kelompok Golkar yang berada di lingkungan PPP, seperti para PNS yang sampai mengungsi di kerabat mereka demi keamanan. Sehingga dampak inilah yang menjadikan sosialisasi dan keharmonisan para warga menjadi renggang. Kedua, dampak ekonomi akibat terjadinya kerusuhan 1997 adalah kerugian material, seperti kerusakan bangunan pertokoan, bank, dan rumah-rumah warga yang di jadikan sasaran kemarahan. Namun untuk perekonomian warga Pekalongan yang mayoritas pedagang batik hampir tidak ada kendala, karena mereka tidak tergantung pada Pemerintah, sehingga mereka tetap bisa menjalankan produksi batik. Ketiga, dampak politik dengan adanya kerusuhan 1997 adalah semakin kuatnya PPP di Kota Pekalongan yang memang mayoritas warga Pekalongan memeluk agama Islam dan memilih PPP sebagai partainya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Alkhatab, Umar Ibnu. 2009. *Dari Beringin ke Beringin: Sejarah, Kemelut, Resistensi, dan Daya Tahan Partai Golkar*. Yogyakarta: Ombak.
- Andrianus, Toni dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Bandung : Penerbit Nuansa.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta : LKIS.
- Bizawie, Milal Zainul. 2002. *Perlawanan Kultural Agama Rakyat, Pemikiran dan Paham Keagamaan Syeh Ahmad Al Mutamakkin dalam Pergumulan Islam dan Tradisi*. Yogyakarta : Penerbit Samha.
- Basyar, Hamdan. 2004. *Ulama dan Kekerasan Politik, Kasus Pemilu 1997 dan 1999 di Pekalongan*. Depok : Hamra Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Gotschlack, Lauis. 1995. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Habib, Achmad. 2004. *Konflik Antaretnik di Pedesaan*. Yogyakarta : LkiS Yogyakarta.
- Haris, Syamsudin. 1991. *PPP dan Politik Orde Baru*. Jakarta : Grasindo.
- . 1998. *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta : Grafiti.
- . 1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- . 1999. *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat dalam Pemilu 1997*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Puspoyo, Widjarnarko. 2012. *Dari Soekarno Hingga Yudhoyono : Pemilu Indonesia 1955-2009* . : Era Adicitra Intermedia.

- Shokheh, Mukhamad. 2008. *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi : Relasi Islam-Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998*. Semarang : UNNES PRESS.
- Suwarno. 2012. *Sejarah Politik Indonesia Modern*. Yogyakarta : Penerbit Ombak.
- Syaifullah. 1997. *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*. Jakarta : Grafiti Press.
- Tebba, Sudirman. 1993. *Islam Orde Baru, Perubahan Politik dan Keagamaan*. Yogyakarta : Tiara Wacana.
- Tim Litbang Kompas. 2002. *Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang : Universitas Negeri Semarang Press.
- , 2017. *Dari IndustriGula Hingga Batik Pekalongan*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.
- Widja, I Gde, . 1989. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.
- Widodo, Sutejo K. 2005. *Ikan Layang Terbang Menjulung, Perkembangan Pelabuhan Pekalongan Menjadi Pelabuhan Perikanan Tahun 1900-1990*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Yulianto, Arif. 2002. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Surat Kabar

Suara Merdeka, 10 Maret 1977

Suara Merdeka, 12 Mei 1997

Arsip Jurnal dan Internet

- Ibrahim, Anis. 2009. *Jurnal Hukum "Argumentum" Vol.8 No.2*. Diakses dari <http://anisibrahim18.blogspot.com/2009/07/lembaga-penyelenggara-pemilu-di.html>, pada Januari 2019).

Kompas. 2014. *Pemilu 1971, Demokrasi Semu*. Diakses dari (<https://nasional.kompas.com/read/2014/01/11/1932246/Pemilu.1971.Demokrasi.Semu>, pada Januari 2019).